

Hubungan Berbatu antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

**Fuad Hilmani
Deasy Silvy Sari
Dina Yulianti**

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Padjadjaran*

*email: fuad20002@mail.unpad.ac.id
deasy.silvy@unpad.ac.id
dina14@unpad.ac.id*

ABSTRACT

The conflict between the Indonesian government and the Free Papua Movement (OPM) in Papua province has been ongoing for decades. The OPM supports Papuan independence and the conflict involves violence, armed confrontations and human rights violations. Although the Indonesian government has issued five policies to resolve this conflict, these efforts have not been very significant. The Free Papua Organization continues to wage armed resistance and attempts to secede from Indonesia. This conflict requires a collaborative and holistic approach to find a solution without further casualties.

Keywords: *Conflict, Papua, OPM, Indonesia, Independence, Violence, Policy, Armed Resistance, Collaborative Approach, Solution.*

Konflik antara Pemerintah Indonesia dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di provinsi Papua telah berlangsung selama beberapa dekade. OPM mendukung kemerdekaan Papua dan konflik ini melibatkan kekerasan, konfrontasi bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lima kebijakan untuk menyelesaikan konflik ini, upaya tersebut belum terlalu signifikan. Organisasi Papua Merdeka terus melakukan perlawanan bersenjata dan upaya pemisahan diri dari Indonesia. Konflik ini memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik untuk menemukan solusi tanpa memakan korban lagi.

Kata kunci: *Konflik, Papua, OPM, Indonesia, Kemerdekaan, Kekerasan, Kebijakan, Perlawanan Bersenjata, Pendekatan Kolaboratif, Solusi.*

Pendahuluan

Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari interaksi antar aktor global, baik itu negara, perusahaan transnasional, perusahaan multinasional, dan bahkan kelompok pemberontak. Hubungan Internasional sendiri merupakan ilmu yang memiliki cakupan luas, tidak hanya mempelajari politik namun unsur-unsur lain seperti ekonomi, hukum, dan identitas pun dipelajari. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan memiliki kekayaan identitas serta budaya. Sebelum tahun 1945, Indonesia belum memiliki konsep persatuan layaknya saat ini dan wilayah Indonesia masih berdiri sendiri-sendiri. Bagian timur Indonesia, yakni Papua memiliki akar budaya Melanesia dan memiliki kesamaan dengan masyarakat yang tinggal di negara-negara Oseania seperti Kepulauan Solomon, sebagian dari Fiji, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (Gault-Williams, 1987). Sebelum adanya

intervensi eksternal, wilayah Papua merupakan wilayah yang terisolasi. Akan tetapi, bila ditelusuri secara historis, kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia telah berusaha mengambil kontrol atas Papua seperti Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Tidore walaupun berujung kepada kegagalan. Namun, Belanda berhasil menguasai Papua sejak tahun 1863-1963.

Wilayah Papua memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia, bahkan mengadaptasi nama Irian (Ikut Republik Indonesia Anti Netherland). Nama Irian dicetuskan oleh pahlawan nasional Frans Kaisiepo dalam Konferensi Malino 1946. Masuknya wilayah Papua, terutama Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai oleh perjalanan panjang dan berbatu, baik dalam perlawanan secara fisik ataupun melalui meja runding. Papua Barat memiliki keadaan yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya karena Belanda masih keras kepala dalam mempertahankan Papua Barat karena potensi sumber daya alamnya yang kaya, terutama dalam hasil tambang seperti emas, nikel, minyak, perak, kayu, dan tembaga. Baik Indonesia dan Belanda bersitegang dalam isu Papua Barat, siapa yang akan memiliki wilayah ini. Pada bulan Agustus 1950, perjanjian antara Indonesia dan Belanda pun dibuat dan Indonesia menuntut Papua Barat untuk masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat.

Perjuangan Indonesia dalam memperebutkan Papua Barat akhirnya selesai setelah tiga belas tahun lamanya. Indonesia, dengan bantuan Amerika Serikat berhasil menekan Belanda untuk melepas Papua Barat. Akan tetapi, Amerika Serikat membantu Indonesia tidak secara cuma-cuma karena Amerika Serikat memiliki kepentingan lain, yaitu mencegah adanya perang lain di kawasan Asia Tenggara karena di periode yang sama Amerika Serikat sedang terlibat dalam Perang Vietnam. Pada tahun 1963, Papua Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, masuknya Papua Barat dalam Indonesia sayangnya diwarnai oleh peristiwa berdarah, bahkan Indonesia dianggap sebagai kekuatan kolonial atau penjajah baru karena kampanye militer yang bersifat opresif dijalankan oleh Indonesia (Djopari, 1995).

Kedatangan pasukan militer Indonesia menyebabkan teror dalam Papua Barat dengan adanya pembunuhan, penyiksaan, dan intimidasi dari tahun 1963-1969. Korban yang berjatuhan selama periode ini diperkirakan mencapai tiga ribu orang. Menindaklanjuti peristiwa ini, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dilakukan untuk menentukan nasib Papua Barat karena gerakan separatisme mulai bermunculan – tidak kaget karena perilaku Indonesia yang abrasif di Papua Barat. Hasil dari Penentuan Pendapat Rakyat 1969 menentukan bahwa Papua Barat tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun, Thomas Agaky Wanda selaku perwakilan dari Organisasi Papua Merdeka menyatakan bahwa proses pemungutan suara bagi Penentuan Pendapat Rakyat tidak sepenuhnya jujur, terdapat trik-trik yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menggaet suara masyarakat Papua Barat.

Keadaan negara pasca kemerdekaan belum sepenuhnya tertata dan kondusif, belum ada infrastruktur yang memadai. Papua Barat, salah satu wilayah yang terlambat bergabung dalam Indonesia, mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan pulau-pulau lain. Masyarakat di Papua Barat belum mendapatkan pendidikan yang optimal dan buta huruf.

Setelah mereka memberikan suara bahwa Papua Barat setuju untuk bergabung dalam Indonesia, mereka mendapatkan hadiah. Bagi masyarakat umum, hadiah yang umum diberikan adalah perhiasan, kendaraan, barang-barang mahal, dan sebagainya. Di sisi lain, pejabat-pejabat di Papua Barat bila mereka setuju dengan bergabungnya Papua Barat ke Indonesia mereka diberikan promosi jabatan, rumah dinas, kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya.

Keadaan pun semakin runyam akibat rezim Soekarno yang pada saat itu cenderung otoriter sehingga kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan untuk berkumpul, dan kebebasan bergerak pun dibatasi. Di Papua Barat, terjadi konflik terus-menerus antara Tentara Nasional Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka dan pada tahun 1969, Organisasi Papua Merdeka mendeklarasikan kemerdekaannya. Pendirian Republik Papua Barat diresmikan pada tahun 1971. Perlawanan Organisasi Papua Merdeka terhadap Tentara Nasional Indonesia pun dilakukan dengan cara gerilya dan persenjataannya pun sederhana. Akan tetapi, mereka masih bisa untuk menyebabkan korban jiwa dari sisi Tentara Nasional Indonesia

Selama periode berdarah antara Organisasi Papua Merdeka dengan Republik Indonesia, terjadi pembantaian massal di Papua Barat karena Tentara Nasional Indonesia berupaya untuk meredam perlawanan gerilya pada tahun 1985. Namun, kebanyakan korbannya adalah warga sipil, terutama warga pedesaan. Kelompok-kelompok separatisme di Papua Barat, baik dari Sayap Barat maupun Timur bersatu dalam Perjanjian Port Vila 1987. Perjanjian tersebut mengakhiri konflik internal yang telah ada selama sembilan tahun lamanya dan proses penyatuan visi, di mana Organisasi Papua Merdeka bertujuan untuk mempertahankan hak bertahan hidup ras Melanesia di Papua Barat. Sejak saat itu, komando Organisasi Papua Merdeka dibagi menjadi dua operasional, satu mengoperasikan gerakan politik dan satu lagi mengoperasikan gerakan militer. Perseteruan antara Organisasi Papua Merdeka dan Republik Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, masing-masing memiliki kepentingannya dan alasan di balik tindakan mereka selama ini.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka secara garis besar dapat diartikan sebagai penelusuran pustaka atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tulisan ini, dimana hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan referensi serta memberikan bukti terkait kebaruan dari artikel yang telah dibuat. Mengingat, penelitian atau pun isu tentang konflik antara organisasi papua merdeka dan Indonesia telah ada sejak puluhan tahun lamanya dan dinamikanya masih terus berkembang hingga saat ini.

Adapun beberapa penelitian yang telah penulis rangkum terkait isu konflik antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini. Diantaranya yaitu Ngatiyem dalam tesisnya menjelaskan terkait stabilitas politik di Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) periode 1964 sampai dengan 1998 sebagai objek kajian dari penelitiannya. Dalam penelitiannya, Ngatiyem menjelaskan sisi historis terkait latar belakang munculnya

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didasari oleh pengaruh pemerintahan Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Residen J. P. Eechoud, yang mana hal ini ditandai dengan lahirnya kaum elit Papua terdidik yang secara tegas memiliki sikap Pro – Papua. Selain itu, dijelaskan bahwa Belanda sebenarnya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tahun 1970, akan tetapi mimpi terkait kemerdekaan itu harus pupus lantaran adanya perjanjian New York 1962 yang membuat Papua Barat harus jatuh ke tangan Indonesia (Ngatiyem, 2007). Dalam penelitian yang ditulis oleh Ngatiyem juga menitikberatkan terkait isu kesenjangan dan ketidakadilan antara pusat dan daerah yang menjadi sebab terjadinya konflik tersebut. Isu – isu ini akhirnya menimbulkan pergolakan yang cukup sulit dalam menemukan titik terang sehingga konflik masih terus berlangsung hingga sekarang. Artinya dalam penelitian yang ditulis oleh Ngatiyem, ia mengambil sudut pandang atau pun perspektif sebagai masyarakat dan entitas sosial politik di Papua.

Tidak hanya itu, terdapat penelitian terdahulu yang juga membahas terkait isu konflik antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka ini, penelitian tersebut dilakukan oleh Sugandi yang membahas tentang konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua. Dalam penelitiannya, Sugandi juga membahas terkait peran dari para *stake holder* terhadap perubahan sosial yang terjadi di Papua, dimana diantaranya yaitu pemerintah lokal, organisasi masyarakat madani, militer, pemerintah pusat, dan berbagai organisasi internasional yang juga turut terlibat. Berbagai isu atau keluhan yang terjadi di tanah Papua menggunakan penyelesaian secara diplomasi mulai menjadi fokus pemerintah Indonesia, argument ini semakin didukung dengan adanya kebijakan terkait otonomi khusus bagi wilayah Papua. Dalam hal ini, tidak sedikit organisasi internasional yang turut mendukung dan membantu keberlangsungan kebijakan pemerintah Indonesia terkait otonomi khusus tersebut. Hal ini dikarenakan pemerataan harus tetap dilakukan secara merata demi menghindari adanya situasi adanya kecemburuan sosial seperti yang terjadi di masa lalu yang kemudian menjadi pemicu konflik kembali merebak.

Sugandi juga turut menambahkan kompleksitas yang terjadi di wilayah Papua tidak terlepas dari kerangka nasional, yakni hubungannya dengan pemerintah pusat itu sendiri. Di tingkat lokal, kelemahan mencakup kurangnya sistem distribusi yang profesional untuk menyebarkan kesejahteraan secara merata. Tingkat keamanan manusia dari kelompok rentan di daerah terpencil juga terpengaruh oleh kondisi perdamaian yang ditandai oleh minimnya hubungan sosial antara negara dan aparat keamanannya dengan masyarakat. Melihat dari hal tersebut, resolusi konflik pada dasarnya justru dapat terselesaikan ditangan kedua belah pihak, baik itu pemerintah Indonesia atau pun Papua sebagai dua entitas utama dalam meraih perdamaian (Sugandi, 2008).

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diketahui bahwa keberlangsungan konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terjadi sampai saat ini dan belum menemukan resolusi yang sesuai. Dinamika hubungan berbatu diantara kedua belah pihak masih menjadi topik yang relevan untuk diteliti dan perlu dikaji terkait kebijakan apa saja yang sesuai serta efektif untuk menghentikan konflik tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan lima sampai

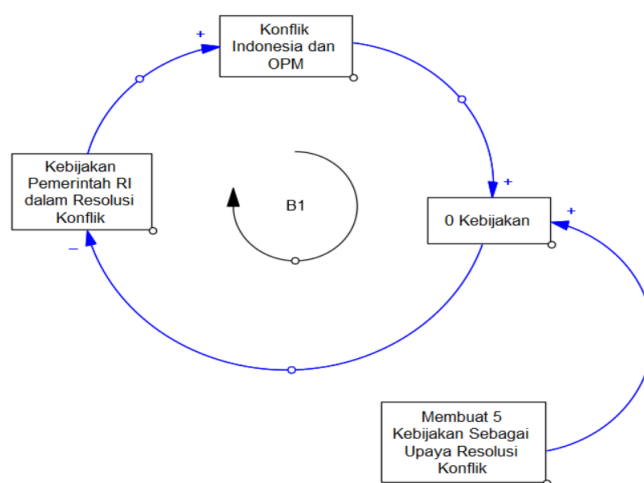
enam tahun yang lalu, artinya diperlukan adanya nilai – nilai kebaruan penelitian sesuai dengan dinamika konflik yang berkembang. Adapun, penelitian ini juga menggunakan metode yang berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dimana pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif atau pun metode dinamika sistem dengan menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dan dibantu dengan alat penelitian yaitu aplikasi Vensim.

Metode Penelitian

Causal Loop Diagram (CLD)

CLD atau yang biasa dikenal dengan *Causal Loop Diagram* pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu cara atau upaya bagi kita dalam memvisualisasikan realitas atau pun dunia nyata. Artinya, dalam proses pembuatan CLD tersebut kita perlu melihat realitas yang ada (dunia nyata), lalu kita identifikasikan hubungan antara berbagai variabel dalam pikiran. Adapun gambaran dari proses cara berpikir ataupun mental tersebut dapat dikenal dengan istilah mental model. *Causal Loop Diagram* membantu memperjelas hubungan timbal balik di dalam struktur sistem.

Diagram yang dihasilkan memberikan representasi visual yang bermanfaat dalam berkomunikasi dan berbagi pemahaman dengan orang lain. Dengan menggunakan Causal Loop Diagram, peneliti dapat menyelidiki kasus atau isu yang dipilih dengan lebih cermat karena mempertimbangkan berbagai faktor terkait yang memengaruhi kasus yang sedang diteliti. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Causal Loop Diagram Negative Feedback dan dapat dilihat sebagai berikut :



Adapun cara membaca CLD Negative Feedback tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

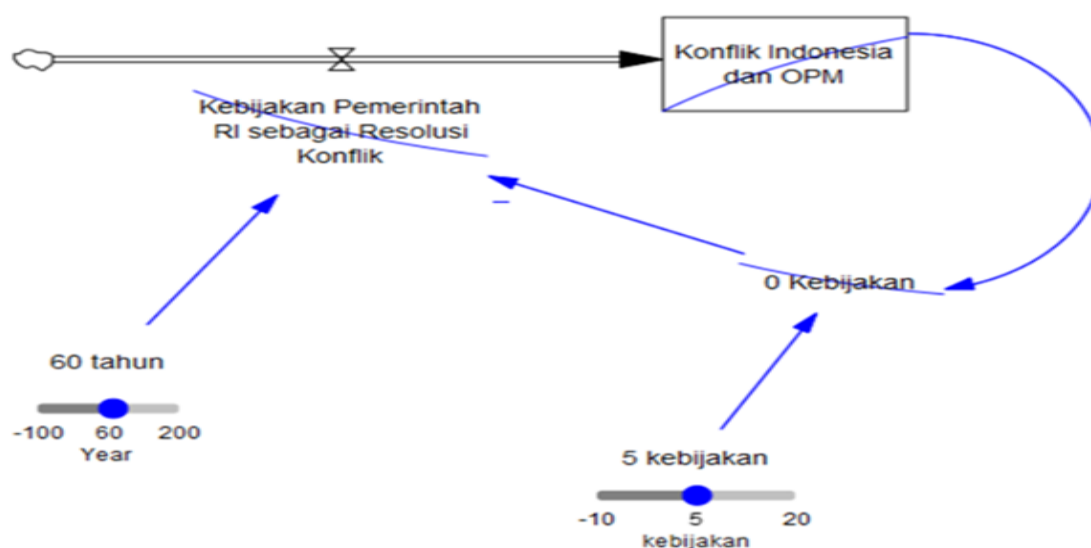
Loop B1

Semakin tinggi konflik yang terjadi antara Indonesia dan OPM, maka akan semakin tinggi konflik tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah RI. Karena polaritasnya searah maka diberi simbol (+) di ujung panah. Semakin tinggi situasi tidak adanya suatu kebijakan, maka semakin tinggi tekanan untuk diharuskan dalam membuat kebijakan sebagai upaya resolusi konflik. Karena polaritasnya berlawanan arah, maka diberi simbol (-) di ujung panah. Semakin banyak kebijakan pemerintah RI dalam upaya resolusi konflik maka semakin tinggi juga kemungkinan terselesaikannya konflik antara Indonesia dan OPM. Karena polaritasnya searah maka diberi simbol (+) di ujung panah. Karena terdapat satu tanda (-) dapat kita simpulkan bahwa ini adalah causal loop negatif dan diberi simbol B (balancing). Semakin banyaknya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah RI, maka kebijakan yang awalnya belum dibuat akan menjadi ada sehingga kemungkinan konflik dapat terselesaikan akan semakin besar.

Stock Flow Diagram (SFD)

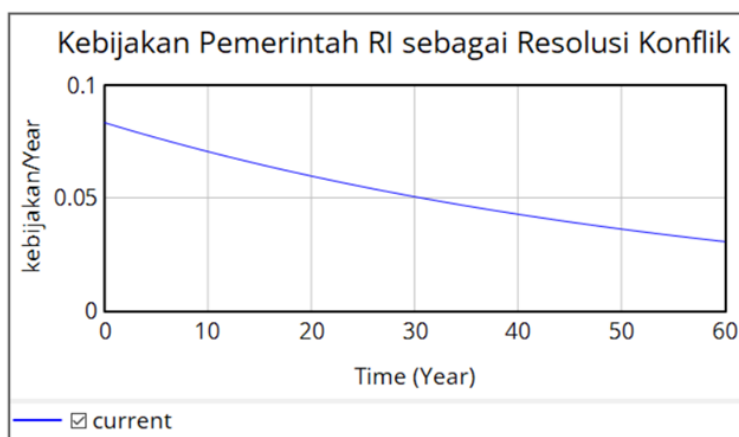
Stock Flow Diagram atau pun biasa disingkat dengan SFD merupakan bentuk turunan *Causal Loop Diagram* (CLD), dimana SFD ini merupakan bentuk penjabaran lebih rinci dari *Causal Loop Diagram*, hal ini dikarenakan pada bagian SFD ini diperhatikan terkait pengaruh waktu terhadap hubungan antar variabel, dimana nantinya setiap variabel diharapkan dapat menggambarkan hasil akumulasi untuk variabel level, serta variabel yang dapat dikategorikan sebagai laju aktivitas sistem tiap periode waktu (rate).

Adapun setidaknya terdapat lima elemen utama yang dimiliki oleh stock flow diagram ini, diantaranya yaitu Level, Cloud atau Source, Flow, Converter, dan Connector. Stock atau level dapat diartikan sebagai jenis variabel yang menunjukkan suatu jumlah. Dari segi matematis sendiri stock dapat didefinisikan sebagai suatu besaran yang didalamnya terdapat nilai yang dapat berubah seiring perubahan waktu, baik itu mengalami peningkatan maupun penurunan dari satu periode ke periode lainnya. Adapun kelebihan yang dimiliki dari SFD ini yaitu diagram ini dapat membuat simulasi model dari isu yang akan diteliti melalui satu periode ke periode lain dalam penggunaannya.



SFD yang digunakan disini menggunakan simulasi dalam jangka waktu 60 tahun (dihitung sejak tahun 1963), dimana waktu tersebut merupakan waktu berlangsungnya konflik yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu, SFD di atas merupakan tahap lanjutan setelah proses CLD sebelumnya dengan menggunakan variabel yang sama. Dimana nantinya hasil dari SFD tersebut diubah menjadi grafik untuk mengetahui terkait apakah gap berhasil direduksi demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil atau Result dari Simulasi SFD



Bentuk SFD pada konflik antara Pemerintah Indonesia dan OPM dapat dijelaskan menjadi sebagai berikut : **Level atau Fenomena** : Konflik antara Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka (OPM) adalah konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade di provinsi Papua, Indonesia. OPM adalah gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia dengan tujuan memisahkan diri sebagai negara merdeka. Konflik ini telah melibatkan berbagai kekerasan, konfrontasi bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia baik oleh pasukan keamanan Indonesia maupun kelompok separatis Papua. **Rate** : Rate dapat diartikan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada tahap level atau fenomena. Dalam konflik yang terjadi antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) diperlukan solusi berupa adanya sebuah kebijakan dari pemerintah RI untuk resolusi konflik, dimana sampai hari ini setidaknya sudah terdapat lima kebijakan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini, diantaranya yaitu : Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Pembangunan Infrastruktur di wilayah Papua, Pendekatan Dialog secara Musyawarah, Penyelesaian Konflik secara Damai, Program Kesejahteraan dan Pendidikan.

Gap : Gap sendiri dapat diartikan sebagai selisih antara nilai actual dari suatu variable dengan nilai yang ditargetkan, Pada gap ini saya mengambil gap variable yaitu tidak ada kebijakan atau nol. Hal ini dikarenakan pemerintah RI cenderung merespon dengan perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok - kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua dibandingkan dengan membuat kebijakan yang lebih dapat diterima secara bersamaan. Dalam hal ini rumus yang digunakan yaitu level-goal (konflik Indonesia dan OPM – lima kebijakan pemerintah RI). **Goal** : Goal dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Goal pada case ini yaitu adanya kebijakan (lima kebijakan pemerintah RI) yang mampu menyelesaikan konflik secara efektif. **Adjustment Time** : Dapat dikatakan sebagai waktu yang diperlukan dalam memperoleh kesimbangan. Adapun Adjustment time yang digunakan pada case ini yaitu 60 tahun, dimana waktu ini merupakan waktunya berlangsungnya konflik (masih berlangsung).

Melihat dari hasil grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil simulasinya menunjukkan kurva yang menurun, hal ini dikarenakan *goal* yang terlalu besar dan *gap* yang terlalu kecil. Hal itu juga yang membuat grafik tampak semakin menurun jauh tiap tahunnya. Hal ini disebabkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih cenderung sedikit dan kurang efektif jika dibandingkan dengan maraknya kasus yang menjadi pemicu konflik kembali meluas.

Pembahasan

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka atau seringkali disingkat sebagai OPM merupakan sebuah organisasi pro kemerdekaan Papua yang terbentuk sejak tahun 1963. Organisasi ini dibentuk

sebagai reaksi masyarakat asal Papua atas sikap pemerintah Indonesia. Perlawanan bersenjata pertama OPM dilakukan pada 26 Juli 1965, dan sejak saat itu hingga saat ini OPM masih aktif dan meminta perpisahan Papua sebagai negara yang terpisah dari Republik Indonesia. Papua secara resmi masuk ke dalam NKRI pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Meski telah ditetapkan menjadi bagian dari republik Indonesia, sebagian masyarakat Papua merasa lebih baik mendirikan negaranya sendiri karena sebagian masyarakat Papua merasa bahwa mereka dibedakan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu wilayah yang terletak di paling luar Indonesia, Papua memiliki jarak yang jauh dari pusat pemerintahan Indonesia. Hal tersebut juga menyebabkan akses terhadap fasilitas-fasilitas umum menjadi sulit. Selain itu, masyarakat Papua dinilai masih menjalani hidup yang kurang sejahtera, hal ini dapat dilihat dari kondisi kemiskinan kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia lah yang menimbulkan semangat bagi sebagian masyarakat Papua untuk memerdekakan diri. Pemerintah Indonesia merespon gerakan separatisme tersebut dengan melakukan Operasi Militer sebagai upaya untuk mengatasi pemberontakan. Namun, hal tersebut malah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menyebabkan keinginan OPM semakin kuat.

Kondisi sosial politik yang kurang baik di Papua memaksa beberapa orang Papua meninggalkan negara mereka. Keinginan kuat sebagian masyarakat Papua juga terlihat dalam usaha-usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada tahun 2006, 42 orang Papua meminta suaka politik kepada pemerintah Australia. empat puluh dua orang tersebut meninggalkan Papua dengan perahu dan memanfaatkan kelemahan pengawasan air di Indonesia. Mereka berlayar selama lima hari dari Merauke, dan akhirnya mendarat di pantai Cape York, Australia Lalu, pada bulan Maret 2006, Kementerian Imigrasi dan Urusan Pribumi Australia (DIMIA) menyediakan Visa Perlindungan Sementara (visa tinggal sementara) untuk 42 dari 43 Orang Papua mencari suaka. Selain itu, pemberontakan bersenjata seringkali dilakukan untuk menunjukkan keinginan pemisahan diri Organisasi Papua Merdeka dari Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa yang terjadi pada 25 Juni 2018 lalu, Organisasi Papua Merdeka menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air pada 25 Juni 2018, yang saat itu disewa Brimob Polri yang sedang bertugas mengamankan pilkada. Dua orang terluka akibat insiden tersebut. Lalu, Pada Desember 2017, pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi diserang salah satu kelompok Organisasi Papua Merdeka. Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh meninggal dan seorang aparat luka berat.

Dari usaha-usaha tersebut dapat terlihat seberapa kuat keinginan Organisasi Papua Merdeka dalam mewujudkan kemerdekaannya dari Republik Indonesia. Hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia karena gerakan separatisme ini tidak hanya

berbahaya bagi masyarakat, tetapi juga berbahaya bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil kembali simpati dan menimbulkan rasa nasionalisme terhadap Republik Indonesia dalam diri masyarakat Papua. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan membuat kebijakan yang efektif dan bersifat merata.

Kebijakan Pemerintah RI untuk Resolusi Konflik

Dalam menangani kasus Organisasi Papua Merdeka, pemerintah telah melakukan berbagai upaya serta kebijakan di dalamnya. Namun, masih maraknya kasus kekerasan tampaknya menjadi bukti bahwa kebijakan atau pendekatan yang dilakukan pemerintah dirasa masih kurang tepat dalam menangani isu tersebut. Mirisnya, tidak sedikit kekerasan justru dilakukan oleh pihak – pihak yang berada dibawah naungan negara dan dianggap sebagai pelindung masyarakat seperti oknum kepolisian dan oknum TNI (Mukhtadi, 2021). Dari sudut pandang yang berbeda, kekerasan juga datang dari kelompok lain yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dalam beberapa waktu terakhir telah menewaskan sejumlah aparat keamanan. Tentu hal ini menjadi tanda bahwa kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan suatu pendekatan yang lebih kolaboratif dan holistik agar isu tersebut menemui titik terang tanpa harus memakan korban lagi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Halkis yang menyatakan bahwa dalam mengatasi isu papua merdeka tidak cukup jika hanya bergantung pada penegakan hukum saja, hal ini karena isu papua merupakan masalah politik. Maka dari itu, strategi diplomasi pertahanan diperlukan dalam menangani isu tersebut (Halkis, 2020). Ditambah lagi, konflik yang terjadi di papua merupakan konflik *vertical* terlama yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Maka dari itu, diperlukan adanya skema penyesuaian untuk menyelesaikan konflik.

Seperti yang telah dipaparkan pada SFD sebelumnya, selama enam puluh tahun konflik berlangsung, setidaknya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lima kebijakan yang bersifat mediasi humanistic dalam resolusi konflik papua. Adapun sampai hari ini setidaknya sudah terdapat lima kebijakan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini, diantaranya yaitu adanya pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, lalu adanya pembangunan infrastruktur di wilayah papua, pendekatan dialog secara musyawarah, penyelesaian konflik secara damai, dan pogram Kesejahteraan serta Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat papua (Kurnianto, 2022).

Untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Papua, pendekatan holistik dan kolaboratif yang lebih mendalam sangat penting. Artinya, pendekatan ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat sipil, dan kelompok adat, untuk mencapai solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu contoh konkret dari partisipasi ini dapat dilihat dari peran seorang YouTuber yang turut membantu masyarakat Papua. Kontribusi yang diberikan oleh YouTuber tersebut, baik

melalui penggalangan dana, penyuluhan, maupun kegiatan sosial lainnya, telah memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga mempererat rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap keharmonisan NKRI (Utama, 2024). Melalui integrasi berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, pendekatan holistik ini memungkinkan pengakuan dan penghormatan terhadap keunikan ataupun ciri khas budaya Papua. Dialog konstruktif yang melibatkan tokoh adat dan pemuda lokal adalah kunci untuk menemukan solusi bersama yang mendukung perdamaian dan integrasi.

Pembentukan forum dialog yang inklusif merupakan langkah penting lainnya. Forum ini harus mengundang partisipasi tidak hanya dari pemerintah dan kelompok separatis, tetapi juga dari masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan pemuda. Dengan beroperasi secara transparan dan memungkinkan partisipasi publik yang luas, forum ini dapat membangun kepercayaan dan mendorong kontribusi dari semua pihak dalam proses perdamaian. Benny Wenda, seorang tokoh Papua yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu. Jika terlaksana, dialog ini dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik melalui pendekatan diplomasi dan kemanusiaan, yang pada akhirnya dapat memperkuat persatuan dan integrasi Papua dalam bingkai NKRI. Namun, hingga saat ini, keinginan Benny Wenda untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo masih belum terealisasi, sehingga harapan untuk memulai dialog damai tersebut belum dapat diwujudkan (CNN Indonesia, 2019). Meskipun demikian, di era Presiden Joko Widodo, Papua mengalami peningkatan signifikan dari segi infrastruktur. Presiden Jokowi menetapkan pembangunan infrastruktur di Papua sebagai prioritas nasional (Setkab.go.id, 2021). Fokus utama dari program tersebut yaitu pembangunan jalan, hal ini bertujuan untuk memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya logistik, dan menurunkan harga barang. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi gerakan separatis, serta meningkatkan kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah.

Terakhir, peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas adalah esensial untuk mendukung usaha perdamaian dan integrasi. Pendidikan yang lebih baik membuka lebih banyak kesempatan bagi pemuda Papua, sementara perbaikan layanan kesehatan meningkatkan kualitas hidup. Akses yang lebih baik ke layanan ini akan membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan kesejahteraan, yang adalah prasyarat penting untuk perdamaian berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu dengan dibentuknya program ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) dan ADiK (Afirmasi Pendidikan Tinggi). ADEM membantu siswa SMA berprestasi dari Papua melanjutkan pendidikan di Jawa dan Bali, sementara ADiK memberi beasiswa untuk pendidikan tinggi (Kemdikbud.go.id, 2023). Program tersebut telah menghasilkan banyak lulusan berkualitas dan diharapkan dapat meratakan pendidikan di Indonesia serta mengurangi gerakan separatis di Papua.

Namun, pengaruh dari kebijakan - kebijakan ini hingga saat ini dapat bervariasi dan cenderung masih belum terlalu signifikan. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk

meningkatkan otonomi daerah dan pembangunan di Papua, masih ada sejumlah masalah yang perlu diatasi, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, perbedaan pendapat terkait otonomi, serta isu-isu hak asasi manusia. Selain itu, konflik yang berkepanjangan justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang masih perlu ditingkatkan lagi.

Kesimpulan

Dalam konteks konflik antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemerintah Indonesia, Papua memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memperoleh kemerdekaan yang terpisah dari Indonesia. Meskipun secara resmi Papua menjadi bagian dari Indonesia melalui resolusi PBB pada 1969, keinginan beberapa masyarakat Papua untuk merdeka tetap kuat. Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai respons terhadap gerakan separatisme justru memperburuk keadaan dengan melanggar hak asasi manusia, yang kemudian semakin memperkuat keinginan OPM untuk merdeka.

Beberapa upaya pemisahan diri dari Indonesia, seperti permintaan suaka politik oleh sejumlah individu Papua ke negara lain dan tindakan kekerasan bersenjata oleh OPM, menunjukkan kekuatan keinginan mereka untuk merdeka. Namun, upaya-upaya ini juga mencerminkan adanya tantangan serius bagi keberlangsungan Indonesia sebagai negara. Pemerintah Indonesia telah mencoba berbagai pendekatan dalam menangani konflik ini, termasuk kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, pendekatan dialog, penyelesaian damai, serta program kesejahteraan dan pendidikan. Namun, hasil dari kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya signifikan dalam menyelesaikan konflik. Masih terdapat masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, perbedaan pendapat tentang otonomi, serta isu-isu hak asasi manusia.

Dengan konflik yang berkepanjangan, pendekatan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berbasis diplomasi menjadi kunci dalam menemukan solusi yang berkelanjutan. Kesenambungan dan peningkatan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua serta pendekatan penyelesaian yang lebih luas perlu dipertimbangkan demi mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan atas konflik Papua. Selain itu, penerapan kebijakan yang efektif juga dapat didukung oleh data dan penelitian yang akurat tentang kondisi sosial ekonomi di Papua. Investasi dalam pengumpulan data akan membantu pemerintah memahami kebutuhan spesifik masyarakat lokal dan mengukur dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perancangan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2019, oktober 8). *Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Siap Bertemu Jokowi*. Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191008124321-134-437717/tokoh-separatis-papua-benny-wenda-siap-bertemu-jokowi](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191008124321-134-437717/tokoh-separatis-papua-benny-wenda-siap-bertemu-jokowi)
- Djopari, J. R. (1995). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasiondo.
- Gault-Williams, M. (1987). Organisasi Papua Merdeka: The free Papua movement lives. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 19(4), 32-43.
- Halkis, M. (2020). The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua. *Society* 8 (1), 234-248.
- Kemdikbud.go.id. (2023, May 2023). *Afirmasi Pendidikan Untuk Pemerataan Pendidikan*. Retrieved from [afirmasipendidikan.kemdikbud.go.id: https://afirmasipendidikan.kemdikbud.go.id/2023/05/03/afirmasi-pendidikan-untuk-pemerataan-pendidikan/](https://afirmasipendidikan.kemdikbud.go.id/2023/05/03/afirmasi-pendidikan-untuk-pemerataan-pendidikan/)
- Kurnianto, T. A. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16 (2), 149-156.
- Mukhtadi. (2021). STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN GERAKAN SEPARATIS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA. *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7 (2), 85-94.
- Ngatiyem. (2007). *Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Setkab.go.id. (2021 , July 30). *Tingkatkan Pemerataan, Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/tingkatkan-pemerataan-pemerintah-percepat-pembangunan-infrastruktur-papua-dan-papua-barat/>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Utama, A. (2024, April 26). *Bobon Santoso dan persoalan pangan orang asli Papua, mengapa harus membicarakannya secara struktural?* Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckdqeckgwk90>